

Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Wilayah Mataraman Jawa Timur ditinjau dari Maqasid Syariah

Doni Fitriyanto

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

email: doni_fitriyanto@uinsatu.ac.id

Abstract

This research investigates the factors influencing poverty levels in the cities and districts of the Mataraman region, East Java Province, within the framework of Maqasid Sharia. Employing a quantitative approach and secondary data analysis from 2018-2023. The data analysis technique used is multiple linear regression with the assistance of EVIEWS 13 software to test the research data. The study focuses on education, Gini ratio, minimum wage, and Regional Gross Domestic Product (GDP) as variables affecting poverty. The findings indicate that education negatively impacts poverty, the Gini ratio correlates positively, minimum wage negatively affects poverty, while GDP shows a negative impact, albeit not significant. These results underscore the importance of education, income equality, adequate wages, and inclusive economic growth in poverty reduction efforts, aligned with the goals of Maqasid Sharia. The study recommends further exploration into health, financial access, and qualitative methods to enhance understanding and policy recommendations. Integrating Sharia economic principles could offer unique solutions in poverty eradication efforts.

Keywords: *Economic Development, Poverty, Maqasid Sharia*

A. Latar Belakang Teoritis

Jawa Timur memegang peranan penting sebagai penyumbang keuangan terbesar kedua di Indonesia, setelah DKI Jakarta, yakni sebesar 14,6% dari perekonomian nasional, dan 25,56% dari perekonomian Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 4,95 persen (c-to-c) pada tahun 2023, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), yakni mencapai Rp2.953,54 triliun dan pendapatan per kapita Rp71,12 juta.

Meskipun Jawa Timur telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, kemiskinan tetap menjadi kendala utama bagi pertumbuhan ekonomi di kota-kota dan kabupaten di provinsi tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4,18 juta jiwa pada Maret 2023, atau sekitar 10,35% dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki proporsi penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Amartya Sen (1999) menyatakan bahwa kemiskinan adalah kurangnya kesempatan mendasar, seperti kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan publik. Sementara itu, menurut Todaro dan Smith (2020) berpendapat bahwa kemiskinan

harus dipahami dalam konteks primer yang lebih luas, termasuk distribusi pendapatan yang tidak konsisten, kesenjangan akses terhadap aset, dan kurangnya peluang keuangan.

Tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pendidikan, upah minimum paling rendah yang ditetapkan oleh pemerintah, skor Gini, dan PDB nasional adalah beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Theodore Schultz dan Gary Becker (1975) menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia yang meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Penelitian empiris juga telah menunjukkan korelasi yang kuat antara tingkat pendidikan dan kemiskinan. Misalnya, studi oleh Psacharopoulos dan Patrinos (2018) menunjukkan bahwa setiap tahun tambahan dalam pendidikan yang diperoleh, dapat secara signifikan mengurangi risiko kemiskinan. Begitu pula, penelitian oleh Hanushek dan Wobmann (2015) menyoroti pentingnya kualitas pendidikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Hasil penelitian dari sanz dan alfredo (2017) menunjukkan bahwa pengurangan atau pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan dengan adanya pendidikan tinggi. Pendidikan

lebih lanjut memungkinkan seseorang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik dan memperoleh gaji yang lebih tinggi.

Menurut teori permintaan dan penawaran kerja, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja yang berpenghasilan rendah dan dengan demikian mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian lain telah menghasilkan temuan yang beragam tentang dampak nyata dari upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kemiskinan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa upah minimum yang lebih tinggi dapat mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan gaji pekerja yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut (Neumark & Wascher, 2008). Namun, ada juga argumen yang menyatakan bahwa kebijakan upah minimum yang tinggi dapat menyebabkan pengurangan jumlah pekerjaan yang tersedia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan (Sabia & Burkhauser, 2010).

Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan berikutnya adalah gini ratio. Gini ratio adalah salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Gini ratio digunakan secara luas oleh pemerintah, lembaga internasional, dan peneliti untuk menganalisis tingkat ketimpangan dalam suatu negara dan memantau perubahan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan dari waktu ke waktu. Studi oleh Deininger dan Squire (1996) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Fatchullah & Room (2023) menunjukkan bahwa indeks Gini memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kedalaman kemiskinan. Hal ini diasumsikan bahwa peningkatan Gini Ratio akan memperburuk ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, namun dampaknya terhadap tingkat kemiskinan masih menjadi perdebatan yang hangat dalam literatur ekonomi. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi, seperti teori Solow dan teori pertumbuhan endogen, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi

yang stabil dapat mengurangi kemiskinan dengan menumbuhkan lapangan kerja baru dan meningkatkan rata-rata pendapatan. Namun, penelitian empiris menunjukkan hasil yang bervariasi tentang hubungan antara PDRB dan kemiskinan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridzky (2018) menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi Pulau Jawa. Sementara penelitian lain menyatakan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan (Arfa, dkk., 2010).

Oleh karena itu, pemahaman yang holistik tentang interaksi antara faktor-faktor ini dan dampaknya terhadap tingkat kemiskinan sangat penting dalam merancang kebijakan yang efektif dalam memerangi kemiskinan. Pendidikan yang baik, upah minimum yang memadai, rasio Gini yang rendah, dan pertumbuhan PDRB yang kuat semuanya memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Investasi dalam pendidikan, kebijakan upah minimum yang tepat, upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif adalah strategi kunci untuk mengatasi kemiskinan.

Dalam Islam, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang harus ditangani secara serius karena dapat merusak kesejahteraan manusia dan masyarakat. Dalam Islam, keadilan ditekankan dalam semua aspek kehidupan, termasuk distribusi kekayaan. Kemiskinan dalam bentuk harta dipandang sebagai salah satu penyebab utama kemiskinan. Dalam Al Qur'an surat At-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa Islam mengajarkan umat Islam memiliki tanggung jawab untuk saling membantu dan mendukung, terutama mereka yang berada dalam kesulitan ekonomi. Dalam pandangan Umer Chapra (2008), kemiskinan sebagai masalah yang multidimensi, yang mencakup tidak hanya kekurangan pendapatan tetapi juga kekurangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Konsep penting dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan dan objektif utama dari syariah (hukum Islam) disebut dengan Maqasid Syariah. Maqasid Syariah merupakan prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai

kesejahteraan manusia melalui perlindungan lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal). Dalam konteks ini, kemiskinan adalah kondisi yang mengancam kesejahteraan manusia dan harus ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

Wilayah Mataraman merupakan suatu wilayah kebudayaan yang meliputi wilayah Jawa Timur bagian barat-selatan karena wilayah tersebut dalam sejarahnya dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Adapun wilayah mataraman antara lain: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Nganjuk memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, namun secara umum menghadapi tantangan kemiskinan yang signifikan.

Meskipun beberapa daerah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, masalah kemiskinan tetap menjadi isu utama yang perlu ditangani. Pertanian masih menjadi sektor utama penggerak ekonomi di banyak daerah tersebut, namun keterbatasan akses terhadap teknologi modern dan infrastruktur yang memadai seringkali menghambat peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Selain itu, ketergantungan pada sektor pertanian membuat ekonomi wilayah ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan kondisi cuaca. Upaya untuk diversifikasi ekonomi, termasuk pengembangan sektor industri kecil dan menengah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan membuktikan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti pendidikan, gini ratio, upah minimum, dan Produk Domestik Regional Bruto kota/kabupaten di wilayah mataraman Provinsi Jawa Timur dan tinjauannya dari perspektif maqasid syariah.

Penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): Pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat

kemiskinan. Artinya, peningkatan pencapaian pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hipotesis 2 (H2): Rasio Gini memiliki efek positif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, semakin besar ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

Hipotesis 3 (H3): Upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti, peningkatan upah minimum akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hipotesis 4 (H4): PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan PDRB akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Hipotesis 5 (H5): Faktor-faktor pendidikan, gini ratio, upah minimum, dan PDRB sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia, secara kolektif mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kota atau kabupaten wilayah Mataraman di Jawa Timur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menilai pengaruh berbagai variabel terhadap tingkat kemiskinan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan hasil yang objektif dan dapat diuji secara statistik. Objek penelitian mencakup kota/kabupaten di wilayah Mataraman, Jawa Timur.

Populasi penelitian meliputi seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Menurut Creswell (2014), purposive sampling melibatkan pemilihan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan pemahaman peneliti tentang populasi atau fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, kota/kabupaten dipilih berdasarkan kriteria data yang lengkap dan relevan untuk variabel yang diteliti. Sampel terdiri dari 13 kota/kabupaten di wilayah Mataraman dengan data lengkap selama periode 2018-2023.

Data dikumpulkan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Jawa Timur untuk periode 2018-2023. Definisi operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut: Variabel Pendidikan diukur dengan rerata

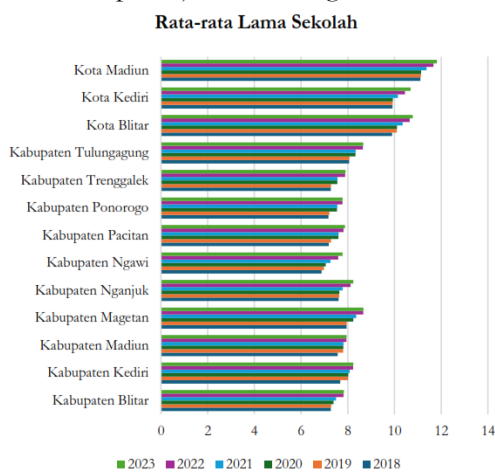
lama sekolah (dalam tahun), Variabel Gini Ratio diukur dengan indeks gini (skala 0-1, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketidaksetaraan sempurna), Variabel Upah Minimum diukur dengan upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah daerah dalam satuan rupiah, Variabel PDRB diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita dalam juta rupiah per tahun, dan Variabel Tingkat Kemiskinan diukur dengan jumlah penduduk miskin dalam ribuan.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji pemilihan model, uji normalitas, uji multikolinieritas, analisis regresi linier berganda, dan Pengujian Hipotesis dengan menggunakan bantuan program software *EViews 13*.

C. Hasil Dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan data atau fenomena tertentu. Creswell menyatakan bahwa analisis deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi kuantitatif tentang fenomena atau populasi tertentu dalam cara yang sistematis dan ringkas (Creswell, 2014). Ia menekankan pentingnya penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan statistik ringkasan untuk mempermudah interpretasi.

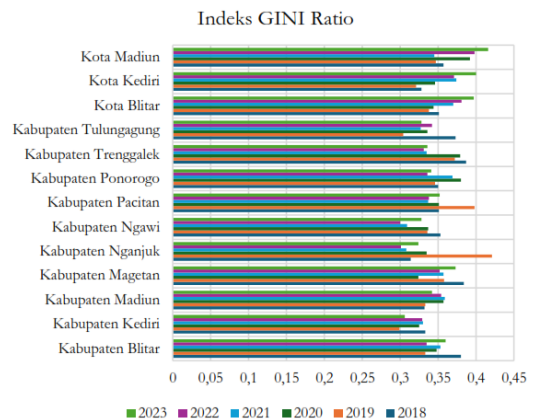
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari laporan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.
Lama Masyarakat Sekolah
Kota/Kabupaten di Wilayah Mataraman
Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan Gambar 1, dapat dideskripsikan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kota dan kabupaten. Kota Madiun, Kota Kediri, dan Kota Blitar memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan di kota-kota tersebut. Kebanyakan daerah menunjukkan peningkatan bertahap setiap tahun, yang menunjukkan keberlanjutan dalam upaya peningkatan pendidikan. Kemungkinan besar, berbagai program pemerintah, peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dan perbaikan fasilitas pendidikan telah berkontribusi terhadap peningkatan ini.

Secara umum, rerata lama sekolah di berbagai kota/kabupaten Mataraman Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam bidang pendidikan, meskipun masih ada kesenjangan antara kota dan kabupaten. Upaya terus-menerus dalam memperbaiki akses dan kualitas pendidikan sangat penting untuk mencapai kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah.



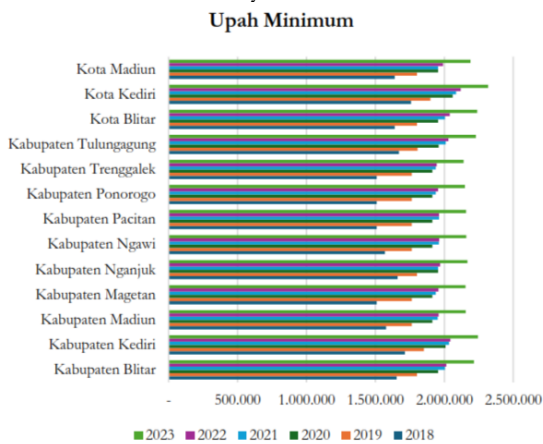
Gambar 2.
Indeks GINI Ratio
Kota/Kabupaten di Wilayah Mataraman
Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan data Gini Ratio dari berbagai kota/kabupaten di Wilayah Mataraman Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2023, menunjukkan bahwa beberapa daerah menunjukkan fluktuasi yang signifikan

dalam Gini Ratio mereka, seperti Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di daerah-daerah tersebut tidak stabil.

Kota-kota besar seperti Kota Kediri dan Kota Madiun menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Ini mungkin mencerminkan peningkatan ketimpangan ekonomi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah di kota-kota tersebut. Banyak kabupaten menunjukkan penurunan Gini Ratio, yang menunjukkan perbaikan ketimpangan pendapatan. Kabupaten seperti Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren perbaikan yang jelas.

Secara umum, beberapa daerah menunjukkan perbaikan dalam ketimpangan pendapatan. Namun daerah lain, terutama kota-kota besar menunjukkan peningkatan ketimpangan. Perlu terus dilakukan upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata di seluruh wilayah.



Gambar 3.

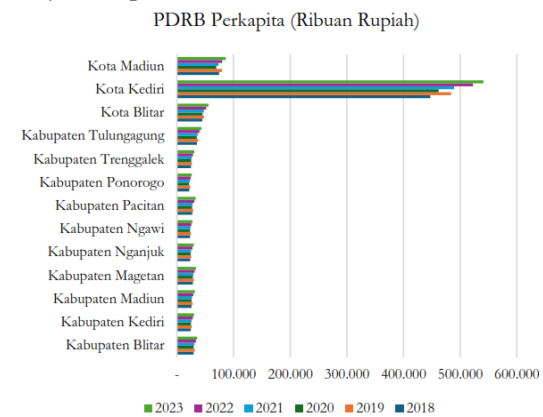
Upah Minimum (rupiah)
Kota/Kabupaten di Wilayah Mataraman
Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan data upah minimum dari berbagai kota/kabupaten di Wilayah Mataraman Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2023 dapat dideskripsikan bahwa semua kota/kabupaten menunjukkan peningkatan upah minimum dari 2018 hingga 2023. Ini mencerminkan penyesuaian upah yang mungkin disebabkan oleh inflasi dan peningkatan biaya hidup. Banyak daerah

menunjukkan kenaikan yang konsisten setiap tahun, menunjukkan adanya kebijakan penyesuaian upah yang diterapkan secara teratur.

Kabupaten Magetan, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek menunjukkan kenaikan yang lebih besar (sekitar 42-43%) dibandingkan daerah lain, yang menunjukkan upaya yang lebih signifikan dalam meningkatkan standar hidup pekerja di daerah-daerah tersebut. Kota-kota besar seperti Kota Kediri dan Kota Madiun memiliki upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain, yang mencerminkan perbedaan dalam biaya hidup dan mungkin juga peluang ekonomi yang lebih besar di kota-kota tersebut.

Secara garis besar upah minimum di berbagai kota/kabupaten di wilayah Mataraman Jawa Timur meningkat secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan penyesuaian terhadap inflasi dan peningkatan biaya hidup, serta upaya untuk meningkatkan standar hidup pekerja. Namun, ada variasi dalam tingkat kenaikan upah minimum antara kota dan kabupaten, yang menunjukkan perbedaan dalam kebijakan regional dan kondisi ekonomi. Upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mengurangi kesenjangan upah dan memastikan bahwa semua pekerja menerima upah yang memadai sesuai dengan biaya hidup mereka.



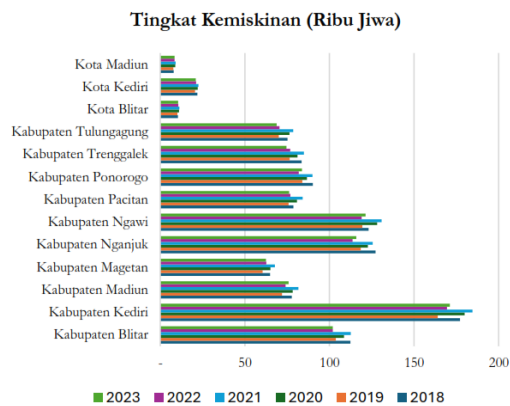
Gambar 4.

PDRB Perkapita (ribuan rupiah)
Kota/Kabupaten di Wilayah Mataraman
Tahun 2018 - 2023

Semua kota/kabupaten menunjukkan peningkatan PDRB per kapita dari 2018 hingga 2023. Pertumbuhan PDRB per kapita

yang positif di setiap daerah menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang stabil, meskipun beberapa daerah mengalami fluktuasi pada tahun tertentu. Ada variasi dalam tingkat kenaikan PDRB per kapita. Kabupaten Nganjuk menunjukkan peningkatan terbesar (27%), sementara Kota Madiun menunjukkan peningkatan terkecil (16,1%). PDRB per kapita di kota-kota seperti Kota Kediri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan dan peluang ekonomi antara kota dan kabupaten.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita di berbagai kota/kabupaten di wilayah Mataraman Jawa Timur meningkat secara signifikan dari tahun 2018 hingga 2023, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di daerah tersebut. Namun, ada variasi dalam tingkat kenaikan PDRB per kapita antara kota dan kabupaten, yang menunjukkan perbedaan dalam kondisi ekonomi dan potensi pertumbuhan di masing-masing daerah. Upaya lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur, terutama bagi daerah-daerah yang mengalami peningkatan PDRB per kapita yang lebih rendah.



Gambar 5.

Tingkat Kemiskinan (ribu jiwa) Kota/Kabupaten di Wilayah Mataraman Tahun 2018 - 2023

Berdasarkan data tingkat kemiskinan menunjukkan sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan penurunan dalam tingkat kemiskinan dari 2018 hingga 2023. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam

kondisi ekonomi dan mungkin hasil dari program pengentasan kemiskinan yang efektif. Di kota-kota seperti Kota Blitar, Kota Kediri, dan Kota Madiun, tingkat kemiskinan cenderung stabil. Ini mungkin menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan ekonomi, tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah penduduk miskin. Kabupaten Trenggalek menunjukkan penurunan terbesar dalam tingkat kemiskinan, sebesar 10,7%, diikuti oleh Kabupaten Blitar dan Kabupaten Nganjuk.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pola penurunan tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di wilayah Mataraman Jawa Timur antara tahun 2018 dan 2023. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kondisi ekonomi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Namun, stabilitas tingkat kemiskinan di beberapa kota menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih substansial di daerah perkotaan. Upaya yang terus-menerus dan fokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan yang stabil atau menurun secara lambat dapat membantu mempercepat penurunan kemiskinan di seluruh wilayah.

Uji Pemilihan Model

Dalam analisis ekonometrika menggunakan perangkat lunak *EViews*, langkah-langkah yang digunakan dalam uji pemilihan model adalah dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier (Savitri et al., 2021).

Tabel 1.

Pemilihan Model Terbaik

Chow Test			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	293.455242	(12,61)	0.0000
Cross-section Chi-square	317.688691	12	0.0000
Hausman Test			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.936233	4	0.0000

Sumber: Data diolah dengan aplikasi *EViews*

Tabel 1 di atas menampilkan hasil output regresi data panel dari penelitian ini. Uji Chow menunjukkan nilai p-value untuk kedua statistik (F-statistic dan Chi-square)

sangat kecil, jauh di bawah tingkat signifikansi 0,05. Karena p-value lebih rendah dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*, dan juga menghasilkan p-value yang sangat kecil, melebihi ambang batas signifikansi 0,05. Hasilnya, *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model yang paling sesuai dengan data penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan model *Fixed Effect Model* sebagai model yang terbaik dan tepat, berikut diperoleh persamaan regresi yaitu:

Tabel 2.
Hasil Regresi

Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan
Method: Panel Least Squares
Sample: 2018 2023
Periods included: 6
Cross-sections included: 13
Total panel (balanced) observations: 78

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	336.1354	52.72256	6.375551	0.0000
Pendidikan	-24.43284	2.977598	8.205555	0.0000
Gini Ratio	4.26E-05	1.73E-05	2.463807	0.0161
Upah Minimum	-374.1346	122.8738	3.044868	0.0032
PDRB	-3.88E-05	2.89E-05	1.343360	0.1833
R squared	0.667317	Mean dependent var		78.78769
Adjusted R squared	0.649088	S.D. dependent var		45.89604
S.E. of regression	27.18782	Akaike info criterion		9.505371
Sum squared resid	53959.96	Schwarz criterion		9.656442
Log likelihood	-365.7095	Hannan-Quinn criter.		9.565847
F-statistic	36.60705	Durbin-Watson stat		0.257922
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah dengan aplikasi *EViews*

Model yang diperoleh dari hasil regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = 336.1354 - 24.43284 \times \text{Pendidikan} + 0.0000426 \times \text{GINI Ratio} - 374.1346 \times \text{Upah Minimum} - 0.0000388 \times \text{PDRB}$$

Berdasarkan tabel 2 diatas maka dapat dijelaskan bahwa Konstanta sebesar 336.1354 dengan tingkat signifikansi 0,0000 menunjukkan nilai tingkat kemiskinan ketika semua variabel independen (Pendidikan,

GINI Ratio, Upah Minimum, dan PDRB) sama dengan nol.

Variabel pendidikan bernilai koefisien negatif sebesar -24.43284. Koefisien ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam variabel Pendidikan, tingkat kemiskinan diharapkan menurun sebesar 24.43284 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan, mengindikasikan pentingnya pendidikan dalam mengurangi kemiskinan.

Nilai koefisien variabel GINI Ratio bernilai positif sebesar 0.0000426. Koefisien ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam GINI Ratio, tingkat kemiskinan diharapkan meningkat sebesar 0.0000426 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Meskipun koefisien ini kecil, arah positifnya menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi yang lebih besar (diwakili oleh GINI Ratio yang lebih tinggi) cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan.

Koefisien regresi variabel Upah Minimum bernilai negatif sebesar -374.1346. Koefisien ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam variabel Upah Minimum, tingkat kemiskinan diharapkan menurun sebesar 374.1346 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Koefisien negatif ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan, menekankan pentingnya kebijakan upah minimum dalam konteks pengurangan kemiskinan.

Nilai koefisien regresi variabel PDRB bernilai negatif sebesar -0.0000388. Koefisien ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam variabel PDRB, tingkat kemiskinan diharapkan menurun sebesar 0.0000388 unit, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Meskipun koefisien ini juga kecil dan tidak signifikan secara statistik dalam model ini, arah negatifnya menunjukkan bahwa peningkatan PDRB cenderung menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel hasil regresi diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel pendidikan menunjukkan koefisien sebesar $-24,43284$ dengan nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ yaitu sebesar $0,0000$. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pendidikan. Secara keseluruhan, peningkatan pendidikan pada umumnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Variabel GINI Ratio memiliki koefisien sebesar $0,0000426$ dan nilai probabilitas $0,0161$. Hal ini menunjukkan bahwa GINI Ratio berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa peningkatan ketimpangan ekonomi berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan.

Variabel Upah Minimum menunjukkan koefisien sebesar $-374,1346$ dengan nilai probabilitas $0,0032$. Menunjukkan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, peningkatan upah minimum cenderung menurunkan tingkat kemiskinan.

Variabel PDRB memiliki koefisien sebesar $-0,0000388$ dan nilai probabilitas $0,1833$ lebih besar dari $0,05$. Menandakan bahwa PDRB berhubungan negatif tetapi tidak signifikan dengan tingkat kemiskinan. Artinya, perubahan dalam PDRB tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dalam model ini.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil perhitungan *Eviews* pada tabel 2 dapat dilihat F-statistic sebesar $36,60705$ dan Prob (F-statistic) sebesar $0,000000$, menolak hipotesis nol. Ini berarti variabel independen (Pendidikan, Gini Ratio, Upah Minimum, dan PDRB) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan kota/kabupaten di wilayah Mataraman Jawa Timur pada tingkat signifikansi 1% .

Koefisien Determinan

Berdasarkan hasil perhitungan *Eviews* pada tabel 2, nilai R-squared sebesar $0,667317$. Ini berarti bahwa $66,73\%$ dari variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen

dalam model (Pendidikan, Gini Ratio, Upah Minimum, dan PDRB). R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Sedangkan nilai Adjusted R-squared sebesar $0,649088$. Nilai ini merupakan penyesuaian dari R-squared yang memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Adjusted R-squared biasanya lebih rendah daripada R-squared karena penalti terhadap penambahan variabel yang tidak relevan. Adjusted R-squared sebesar $64,91\%$ masih menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menjelaskan variasi dalam tingkat kemiskinan, setelah memperhitungkan jumlah variabel independen yang digunakan.

Pembahasan

Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pendidikan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota/kabupaten di wilayah mataraman Jawa Timur. Temuan ini konsisten dengan berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan dianggap sebagai alat utama untuk memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara produktif dalam pasar tenaga kerja.

Dalam *Human Capital Theory* menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam modal manusia yang meningkatkan produktivitas dan kemampuan ekonomi individu. Peningkatan pendidikan akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif, yang dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (Schultz, 1961). Kemudian Becker (1964) Memperkuat konsep ini dengan menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.

Studi tentang kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh Sudarno, dkk., (2004) menemukan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kemiskinan. Peningkatan akses dan kualitas

pendidikan berhubungan dengan pengurangan tingkat kemiskinan di berbagai provinsi di Indonesia. Dalam penelitian empiris yang lain juga menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, diukur melalui hasil belajar siswa, memiliki hubungan kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan jangka panjang (Eric dan Ludger, 2008). Ditegaskan lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh George P. dan Harry P. (2018) ditemukan bahwa pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di banyak negara berkembang. Peningkatan tingkat pendidikan berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan mobilitas sosial yang lebih tinggi.

Menurut laporan dari BPS Jawa Timur, kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah lebih dari 9 tahun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang rata-rata lama sekolahnya kurang dari 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara rata-rata lama pendidikan dan kemiskinan di Jawa Timur khususnya wilayah Mataraman. Laporan tersebut menunjukkan bahwa daerah dengan rata-rata lama pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Data ini mendukung temuan bahwa investasi dalam pendidikan merupakan strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Melihat betapa pentingnya pendidikan terhadap tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan investasi dalam pendidikan sebagai strategi kunci untuk mengatasi kemiskinan. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan anggaran pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Pengaruh GINI Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan

Dalam penelitian ini GINI Ratio memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota/kabupaten di wilayah mataraman Jawa Timur. Dengan kata lain, peningkatan dalam GINI Ratio cenderung meningkatkan tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi sering

kali mencerminkan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak merata, yang dapat menghambat akses terhadap peluang ekonomi bagi kelompok yang kurang mampu. Dalam bukunya *Development as Freedom*, Sen, A. (1999) menekankan bahwa ketimpangan pendapatan dapat membatasi kemampuan individu untuk mengakses peluang ekonomi dan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat kemiskinan.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Ravallion (2001) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki efek negatif pada upaya pengentasan kemiskinan. Di negara-negara dengan ketimpangan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi cenderung kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan mengurangi kesempatan bagi kelompok yang kurang mampu untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan, yang berujung pada siklus kemiskinan yang sulit diputus (Dabla-Norris, et al., 2015).

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa GINI Ratio memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota/kabupaten di wilayah mataraman Jawa Timur. Peningkatan dalam ketimpangan pendapatan, yang tercermin melalui GINI Ratio yang tinggi, dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata yang menghambat akses ke peluang ekonomi bagi kelompok yang kurang mampu. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghalangi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya, yang merupakan faktor penting untuk keluar dari kemiskinan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pembuat kebijakan perlu fokus pada strategi yang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti program redistribusi pendapatan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan peluang ekonomi yang inklusif.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

kota/kabupaten di wilayah mataraman Jawa Timur. Temuan ini sejalan dengan berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa upah minimum memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah, yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam *Efficiency Wage Theory* Stiglitz (1986) menyatakan bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja karena mereka merasa lebih termotivasi dan lebih sehat. Selain itu, upah yang lebih tinggi dapat mengurangi pergantian karyawan dan meningkatkan stabilitas kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Belman & Wolfson (2014) menyimpulkan bahwa peningkatan upah minimum memiliki efek positif pada pendapatan pekerja berupah rendah dan dapat membantu mengurangi kemiskinan. Studi yang dilakukan Majid (2017) menemukan bahwa peningkatan upah minimum memiliki dampak signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di sektor formal.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa upah minimum memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan kota/kabupaten di wilayah mataraman Jawa Timur. Peningkatan dalam upah minimum dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan upah minimum dapat memberikan dampak langsung pada kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan pendidikan. Selain itu, upah yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Pemerintah daerah dan pembuat kebijakan harus mempertimbangkan peningkatan upah minimum sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan. Kebijakan upah minimum yang memadai dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah.

Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil analisis regresi dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan kota/kabupaten di wilayah mataraman Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan PDRB sering dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang positif, hal tersebut tidak selalu berhubungan langsung dengan pengurangan tingkat kemiskinan. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan tidak signifikannya pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan.

Dalam teori *Trickle-Down Economics* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan peningkatan PDRB akan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang miskin. Namun, kritik terhadap teori ini menyebutkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi sering kali tidak sampai kepada kelompok miskin. Krugman (1995) menyatakan bahwa tanpa kebijakan redistributif yang tepat, pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk ketimpangan dan tidak signifikan mengurangi kemiskinan. Dalam bukunya "*Economic Development*", Todaro dan Smith menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan semua lapisan masyarakat, terutama jika ketimpangan pendapatan tinggi.

Dalam penelitian empiris, Ravallion (2001) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui PDB per kapita, tidak selalu secara signifikan terkait dengan penurunan kemiskinan kecuali didukung oleh kebijakan yang mempromosikan inklusi sosial. Senada dengan penelitian Ravallion, penelitian yang dilakukan oleh Dollar dan Kraay (2002) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan tanpa distribusi pendapatan yang lebih merata.

Data BPS menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan PDRB di kota/kabupaten wilayah mataraman Jawa Timur, tingkat kemiskinan tidak selalu menurun secara keseluruhan, yang menunjukkan bahwa keuntungan dari

pembangunan finansial tidak didistribusikan secara merata. Kebijakan redistributif yang efektif dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, memperoleh manfaat dari perluasan ekonomi. Ini dapat mencakup subsidi langsung, program bantuan sosial, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Kedua, mendukung pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), tentunya sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pemerintah dapat menyediakan akses pembiayaan yang murah, pelatihan bisnis, dan pasar untuk produk UMKM.

Pengaruh pendidikan, gini ratio, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan ditinjau dari Maqasid Syariah

Kerangka Maqasid Syariah merupakan konsep yang mendasari tujuan-tujuan utama atau maksud-maksud dari hukum-hukum Islam. Ini membantu dalam memahami prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam serta bagaimana hukum-hukum tersebut dimaksudkan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin*, Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariat) dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu *Hijz al-Din*: Memelihara agama atau kepercayaan agama. *Hijz al-Nafs*: Memelihara jiwa atau kehidupan. *Hijz al-Nasl*: Memelihara keturunan atau keluarga. *Hijz al-Mal*: Memelihara harta atau kekayaan. Dan *Hijz al-'Aql*: Memelihara akal atau kebijaksanaan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hukum-hukum Islam, dalam segala bentuknya, seharusnya dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan ini, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan bermoral.

Ada lima prinsip utama dalam Maqasid Syariah yang memberikan landasan untuk memahami bagaimana faktor-faktor yang diteliti (pendidikan, Gini ratio, upah minimum, dan PDRB) dapat mempengaruhi pencapaian tujuan syariah dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Berikut adalah kerangka Maqasid Syariah dalam konteks ini:

Pendidikan dalam Perspektif Maqasid Syariah

Pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan Maqasid Syariah. Dalam konteks Maqasid Syariah, menjaga akal (*Hijz al-Aql*) melalui pendidikan adalah salah satu tujuan penting yang dapat membantu mengatasi kemiskinan dengan memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktis akan meningkatkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis, membantu dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial.

Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik sebagai landasan bagi kemajuan individu dan masyarakat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah: 11 yang artinya "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat". Baginda Rasulullah juga mengatakan dalam haditsnya: "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat" (HR. Tirmidzi). Tokoh seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Khaldun mengembangkan konsep pendidikan dalam konteks moral dan intelektual yang menyeluruh, yang sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas akal dan iman individu.

Berdasarkan Maqasid Syariah, beberapa solusi yang dapat ditawarkan dalam persoalan pendidikan adalah Akses Pendidikan Berkualitas: Memastikan semua lapisan masyarakat memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Program Beasiswa: Memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin untuk meningkatkan akses mereka ke pendidikan tinggi. Dan Pendidikan Berbasis Nilai: Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kurikulum untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak mulia.

Gini Ratio dalam Perspektif Maqasid Syariah

Dalam konteks distribusi ekonomi dan sosial, Gini ratio mencerminkan adil atau tidaknya distribusi kekayaan dalam masyarakat. Ketimpangan yang tinggi sering kali berkaitan dengan tingginya tingkat kemiskinan. Dalam Islam, keadilan distribusi kekayaan sangat ditekankan. Surat Al-Hasyr

ayat 7 menyatakan: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.". Dari perspektif Maqasid Syariah, keadilan dalam distribusi kekayaan adalah bagian dari menjaga harta (*Hijz al-Mal*). Dalam pandangan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah tentang keadilan sosial dan ekonomi mencerminkan prinsip-prinsip yang relevan dalam menilai distribusi kekayaan dan upaya mengurangi ketimpangan sosial. Ketimpangan yang tinggi dapat menghalangi tercapainya kesejahteraan umum, sehingga diperlukan kebijakan redistributif untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Solusi yang ditawarkan berdasarkan maqasid syariah untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam masyarakat adalah memperkuat mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat secara langsung mengalihkan sebagian kekayaan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Ini mengurangi kesenjangan ekonomi dan menyediakan dana yang bisa digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Dana zakat yang diterima oleh penerima zakat (*mustahik*) dapat meningkatkan konsumsi mereka, yang pada gilirannya mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya infak, beban negara dalam memberikan bantuan sosial dapat berkurang karena masyarakat secara mandiri membantu sesama. Infak juga dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial dan ekonomi yang memberdayakan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Sedekah membantu memperkuat jaringan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan inklusif. Sedekah juga memberikan dampak psikologis positif bagi pemberi dan penerima, meningkatkan rasa empati dan kepuasan batin, yang berkontribusi pada harmoni sosial. Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu negara.

Upah Minimum dalam Perspektif Maqasid Syariah

Upah minimum adalah instrumen penting untuk memastikan pekerja menerima pendapatan yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka. Hadits Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya memberikan upah yang adil: "Berikanlah pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah).

Kebijakan upah minimum yang adil sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menjaga kehidupan (*Hijz al-Nafs*) dan harta (*Hijz al-Mal*), memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan layak dan memiliki akses ke kebutuhan dasar. Solusi upah minimum berdasarkan maqasid syariah ialah menetapkan upah minimum yang mencerminkan kebutuhan hidup layak untuk menjaga kesejahteraan pekerja. Kebijakan kesejahteraan pekerja dengan memberikan tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan dan perumahan untuk pekerja berupah rendah. Melibatkan serikat pekerja dan pengusaha dalam dialog untuk menetapkan upah yang adil dan meningkatkan kondisi kerja.

PDRB dalam Perspektif Maqasid Syariah

PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang diukur dengan PDRB, secara teoritis dapat mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan merata agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah, yang menekankan pentingnya kesejahteraan umum (*maslahah 'ammah*) dan keadilan sosial. pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif juga merupakan bagian dari pemeliharaan harta (*hijz al-maal*) dan Pemeliharaan Keturunan (*Hijz al-Nas*). Meskipun pertumbuhan ekonomi penting, ia harus sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan distribusi yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan: "Dan janganlah kamu mengkhawatirkan rezeki yang Allah telah memberikannya kepada sebahagian kamu lebih besar dari sebahagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan" (QS. An-Nisa: 32). Dalam kitabnya *Al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyampaikan tentang siklus kekayaan dan kebangkrutan menggambarkan pentingnya

distribusi yang adil dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial.

Adapun solusi yang dapat diberikan terkait dengan PDRB berdasarkan maqasid syariah adalah sebagai berikut: pertama, Inklusi Sosial dan Ekonomi: memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Kedua, Investasi di Sektor Sosial: Mengalokasikan sebagian dari pertumbuhan ekonomi untuk investasi di sektor sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Dan ketiga, Pemberdayaan Ekonomi: Program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok miskin melalui pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha.

D. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti pendidikan, gini ratio, upah minimum kerja, dan produk domestik regional bruto (PDRB) kota/kabupaten di wilayah mataraman provinsi Jawa Timur, serta meninjau hasilnya dalam kerangka Maqasid Syariah. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan utama dari penelitian ini:

Pendidikan berkorelasi negatif dengan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi durasi pendidikan di suatu daerah, semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Gini ratio memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu daerah, semakin tinggi tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Upah minimum memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Peningkatan upah minimum berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan.

PDRB menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, tetapi efeknya tidak signifikan. Meskipun pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, dampaknya tidak cukup signifikan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan, pengurangan ketimpangan pendapatan, upah minimum yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.

E. Rekomendasi

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar variabel seperti kesehatan, akses ke layanan keuangan, dan infrastruktur juga dipertimbangkan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam dan focus group discussions dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap kemiskinan yang mungkin tidak terjangkau oleh data kuantitatif. Analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, dan sedekah dapat diintegrasikan dalam upaya pengentasan kemiskinan, karena mekanisme redistribusi kekayaan dalam ekonomi syariah menawarkan solusi unik. Mengembangkan kerangka teori yang kuat dengan mengintegrasikan literatur terbaru tentang ekonomi pembangunan dan syariah akan memperkuat analisis dan interpretasi hasil penelitian.

F. Referensi

- Agustina, P., & Fitriyanto, D. (2024). Exploration Of The Contribution Of Smes To Economic Growth In East Java Province 2020-2022. *Ammer: Journal Of Academic & Multidicipline Research*, 4(01), 16-23. <https://doi.org/10.32503/ammer.v4i01.5380>
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. (2016). Jakarta: Kementerian Agama RI
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Becker, Gary S. (1975). *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. 2nd Edition. National Bureau of Economic.
- Belman, D., & Wolfson, P. J. (2014). *What Does the Minimum Wage Do?* Upjohn Institute for Employment Research.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2024). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka*

- 2024, Jawa Timur: BPS Provinsi Jawa Timur.
- Burkhauser, Richard V and McNichols, Drew and Sabia, Joseph J. (2023). Minimum Wages and Poverty: New Evidence from Dynamic Difference-in-Differences Estimates. National Bureau of Economic Research. Doi:10.3386/w31182 <http://www.nber.org/papers/w31182>
- Chapra, M. U. (2008). "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah". Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W. (2014). "Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan". Pustaka Pelajar.
- Dabla-Norris, E., et al. (2015). Causes and consequences of income inequality: A global perspective. *IMF Staff Discussion Note SDN/15/13*. <https://doi.org/10.5089/9781513555188.006>
- Deininger, K., & Squire, L. (1996). A New Data Set Measuring Income Inequality. *World Bank Economic Review*, 10(3), 565–591. doi:10.1093/wber/10.3.565
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195-225.
- Fatchullah El Islami, M., Room Fitrianto, A. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Inflasi, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kedalaman Kemiskinan Satu Dekade. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, IX (1). <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6994>
- Fitriyanto, D. (2021). Financial Inclusion Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mempengaruhi Perkembangan Umkm Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Commodities, Journal of Economic and Business*, 1(4), 295-306. Retrieved from <https://ejournal.ijshs.org/index.php/commo/article/view/292>
- Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23-31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hanushek, E. A., & Wößmann, L. (2015). *The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann. 2008. "The Role of Cognitive Skills in Economic Development." *Journal of Economic Literature*, 46 (3): 607–68. DOI: 10.1257/jel.46.3.607 <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.46.3.607>
- Neumark, D., & Wascher, W. (2008). *Minimum Wages*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: a decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. doi:10.1016/S0305-750X(01)00072-7
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803-1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality, and Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, 29(11), 1803-1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Sabia, J. J., & Burkhauser, R. V. (2010). Minimum Wages and Poverty: Will a

- \$9.50 Federal Minimum Wage Really Help the Working Poor? *Southern Economic Journal*, 76(3), 592–623.
<https://doi.org/10.4284/sej.2010.76.3.592>
- Sala-i-Martin, X. (2006). The World Distribution of Income: Falling Poverty and Convergence Period. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 351–397.
<https://doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.351>
- Sanz, R., Peris, J.A., Escames, J. (2017). Higher education in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain La educacion superior ante la lucha contra la pobreza desde el enfoque de las capacidades: El caso de Espana. *Journal of Innovation & Knowledge*, 2(2). 53-66.
<https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.03.002>
- Savitri, C., Faddila, S.P., Irmawati, Iswari, H. R., Anam, C., Syah. S., Mulyani, S. R., Sihombing, P. R., Kismawadi, E. R., Pujiyanto, A., Mulyati, A., Astuti, Y., Adinugroho, W. C., Imanuddin, R., Kristia, Nuraini, A., & Siregar, M. T. (2021). *Statistik Multivariat dalam Riset*. Widiana Bhakti Persada Bandung.
- Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1-17.
- Sen, A. (1999). "Development as Freedom." Oxford University Press.
- Stiglitz, Joseph E., Theories of Wage Rigidity (1984). NBER Working Paper No. w1442, Available at SSRN:
- Sumarto, S., Suryahadi, A., & Arifianto, A. (2004). Governance and poverty reduction: Evidence from newly decentralized Indonesia. *SMERU Working Paper*.
<https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.858484>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). "Economic Development." 13th Edition. Pearson.
- Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. . (2022). Pengaruh PDRB, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (6th ed.). Cengage Learning.